

KEBERADAAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI BAGIAN DARI ARSIP NEGARA DALAM UPAYA UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Irmina Tutik Sundari¹, Dwi Haryati²

INTI SARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan Protokol Notaris sebagai arsip negara ditinjau dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Undang-Undang Kearsipan), serta sejauh mana pengaturan secara khusus mengenai Protokol Notaris sebagai arsip negara dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJNP) dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian bahan pustaka, disertai wawancara untuk mendukung bahan pustaka. Data dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.

Ditinjau dari Undang-Undang Kearsipan, Protokol Notaris tidak termasuk kategori arsip negara secara umum, melainkan arsip negara yang bersifat khusus. Kekhususan tersebut terletak pada sumber pembiayaan dan pengaturan yang khusus dalam UUJNP, terkait tujuan dari produk Protokol Notaris yang salah satunya adalah akta autentik sebagai alat bukti. Pengaturan mengenai Protokol Notaris dalam UUJNP sudah cukup memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Kepastian hukum dipenuhi dalam ketentuan mengenai cara pembuatan dan penyimpanan Protokol Notaris, perlindungan hukum dipenuhi dalam ketentuan mengenai sanksi dan penyerahan Protokol Notaris.

Kata Kunci: Arsip Negara, Protokol Notaris, Kepastian dan Perlindungan Hukum.

¹ Jln. Mliwis 4, Demangan Baru, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta

²Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

THE EXISTENCE OF NOTARY PROTOCOLS AS A PART OF THE NATIONAL ARCHIVES IN THE EFFORTS TO PROVIDE LEGAL CERTAINTY AND PROTECTION FOR THE SOCIETY

Irmina Tutik Sundari³, Dwi Haryati⁴

ABSTRACT

This research aims to find out and examine the existence of the Notary Protocol as national archives in terms of Law number 43 of 2009 concerning Archives (Archival Law), as well as the extent of specific regulation all about Notary Protocol as national archives in Law Number 2 of 2014 concerning Amendment to Law number 30 of 2004 concerning Notary Position (UUJNP) in providing legal certainty and protection for the society.

This research is normative legal research namely library research and interviews to support data collection methods. Data were analyzed by qualitative analysis method, which describes data qualitatively in the form of regular, logical, and effective sentences, so answers towards legal problems which were being examined can be obtained.

Regarding to the Archival Law, the Notary Protocol is not commonly included in the national archives, but in special national archive. That specificity lies on the financing sources and special arrangements in UUJNP, related to the purpose of the Notary Protocol product which one of them namely authentic deed as an evidence. The regulation of the Notary Protocol in UUJNP are sufficient to provide legal certainty and protection for the society. Legal certainty is fulfilled in the provision concerning the method of making and storing the Notary Protocol. Legal protection is fulfilled in the provision concerning the sanctions and submission of Notary Protocol.

Keywords: National Archives, Notary Protocol, Legal Certainty and Protection.

³ Jln. Mliwis 4, Demangan Baru, Kel. Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta

⁴ Magister of Notary, Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta